

**RESPON COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES (CPOPC)
DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II*
(RED II) UNI EROPA**

Oleh : Siti Rayya Putri Benyamin
Pembimbing: Ahmad Jamaan
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Council of Palm Oil Producing Countries adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh negara produsen minyak kelapa sawit, yaitu Indonesia dan Malaysia. CPOPC dibentuk untuk mengoordinasikan langkah-langkah strategis dalam menjaga citra baik produk kelapa sawit dan menghadapi tantangan perdagangan internasional. Tindakan Uni Eropa yang dianggap proteksionis, terutama dalam kebijakan RED II yang mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan, menjadi fokus penelitian ini. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana CPOPC merespons kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang bersumber dari beberapa buku, jurnal, artikel, website. Penelitian ini menggunakan perspektif Neoliberalis Institusional dan teori diplomasi ekonomi.

Hasil dari tulisan ini menyimpulkan bahwa CPOPC telah merespon kebijakan RED II menggunakan diplomasi ekonomi dalam bentuk persuasif, seperti negosiasi diplomatik dan negosiasi teknis. Namun, nyatanya upaya tersebut belum mampu mengubah keputusan Uni Eropa. Kebijakan RED II tetap diberlakukan tanpa adanya perubahan yang signifikan atas permintaan atau keberatan yang diajukan oleh CPOPC. Ini menunjukkan bahwa CPOPC tidak memiliki daya tawar atau daya paksa yang signifikan terhadap Uni Eropa.

Kata Kunci: Crude Palm Oil, Proteksionisme, Uni Eropa, Economic Diplomacy

ABSTRACT

The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) is an international organization established by palm oil-producing countries, namely Indonesia and Malaysia. CPOPC was formed to coordinate strategic measures in maintaining the positive image of palm oil products and addressing challenges in international trade. The European Union's actions, deemed protectionist—particularly through the RED II policy that excludes palm oil from the renewable energy sector—are the focus of this study. This paper aims to examine how CPOPC responds to such policies.

The research employs a qualitative method, with data collection techniques including literature studies from books, journals, articles, and websites. The study uses the Neoliberal Institutionalism perspective and the theory of economic diplomacy.

The findings conclude that CPOPC has responded to the RED II policy using economic diplomacy in the form of persuasive measures, such as diplomatic negotiations and technical discussions. However, these efforts have not succeeded in changing the European Union's decision. The RED II policy remains in effect without significant modifications in response to CPOPC's requests or objections. This indicates that CPOPC lacks substantial bargaining power or coercive influence over the European Union.

Keywords: Crude Palm Oil, Protectionism, European Union, Economic Diplomacy

PENDAHULUAN

Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) adalah organisasi antar-pemerintah yang dibentuk oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015. Adapun tujuan dari terbentuknya CPOPC ialah kedua negara mengakui bahwa minyak kelapa sawit merupakan komponen penting bagi pasokan global sehingga untuk mengantisipasi adanya hambatan perdagangan maka diperlukan sebuah wadah untuk mewakili prioritas, kepentingan dan aspirasi-aspirasi negara produksi minyak sawit di dunia. Indonesia dan Malaysia merupakan produsen CPO terbesar dengan persentase total mencapai 85,36% dari total produksi CPO dunia pada tahun 2017 (Indonesia 52,65% dan Malaysia 32,71%). Sedangkan ekspornya, di tahun yang sama, mencapai 91,20% dari total ekspor CPO dunia (Indonesia 52,39% dan Malaysia 38,81%)¹

Proses ekspor CPO ke Uni Eropa mengalami hambatan dengan adanya kebijakan Renewable Energy Directive (RED) di tahun 2009.² RED merupakan kebijakan untuk mengontrol negara Uni Eropa dalam mengurangi gas rumah kaca sekurang-kurangnya 20%, dan meningkatkan energi terbarukan yang ramah lingkungan.³ Dengan adanya RED ini negara produsen CPO kemudian di kenakan tarif anti dumping dalam kegiatan ekspor minyak sawit ke UE dengan jumlah

sebesar 178,85 euro/ton. Kebijakan ini mengakibatkan penurunan ekspor CPO Malaysia ke Uni Eropa. Pada tahun 2009 ekspor menurun dari 2,05 juta ton menjadi 1,8 juta ton. Kemudian juga berdampak pada ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang dimana pada tahun 2012 sebanyak 1,2 juta ton turun menjadi 387 ribu ton di tahun 2013.⁴

Hal ini tentunya menghambat ekspor minyak sawit Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa, melihat kondisi ini kemudian ada beberapa tindakan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi hambatan perdagangan minyak kelapa sawit. Salah satu yang dilakukan Indonesia untuk melawan hal ini secara tidak langsung ialah pembentukan Council Of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC yang merupakan organisasi antar pemerintah dimana anggotanya terdiri dari negara-negara penghasil kelapa sawit.

Uni Eropa kembali mengeluarkan kebijakan melalui Renewable Energy Directive atau RED jilid II pada tahun 2018 sebagai pengganti dari RED I 2009 melalui kesepakatan ini akan dilakukan pengurangan secara bertahap pada tahun 2020-2030. Uni Eropa memastikan bahwa tanaman yang digunakan untuk produksi biofuel tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut, dalam RED II penggunaan minyak sawit akan dibatasi bahkan di hapuskan secara bertahap di pasar UE dan juga menetapkan bahwa Uni Eropa wajib memenuhi 32% kebutuhan sumber energi terbarukan pada tahun 2030. Dengan kata lain UE akan tetap menggunakan sumber bahan bakar nabati lainnya seperti minyak rapeseed dan soy bean, namun tidak dari sawit hal ini

¹ Muhammad Hudori, "Perbandingan Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Citra Widya Edukasi* 9, no. 1 (2017): 93–112.

² Rosita Dewi, "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan," *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1, no. 2 (2018): 201–65.

³ Yuni Permatasari, "Pemberhentian Impor Kelapa Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Dalam Perspektif Ekonomi Politik (National Interest)," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 1 (2022): 105–45.

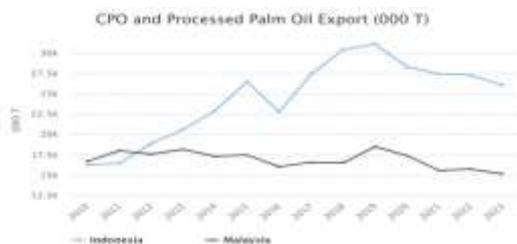
⁴ Widyaningtyas, Dian, and Tri Widodo. "Analisis pangsa pasar dan daya saing CPO Indonesia di Uni Eropa." *Jurnal Manajemen Daya Saing* 18.2 (2017): 138-145.

tentu menunjukkan sebuah diskriminasi besar bagi sawit.⁵

Delegated Act berfungsi sebagai penentu Indirect Land-use Change (ILUC) dalam kerangka regulasi Uni Eropa. Melalui Pasal 26 dari Renewable Energy Directive II (RED II), pada tanggal 13 Maret 2019, Uni Eropa menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi bahan baku yang berisiko tinggi terhadap ILUC. Kriteria ini mencakup bahan baku yang mengalami ekspansi lahan lebih dari 1% dan menggunakan lahan seluas lebih dari 100.000 hektar. Selain itu, porsi ekspansi tersebut juga harus mencakup lahan dengan cadangan karbon yang tinggi, lebih dari 10%. Dengan pengaturan ini, Uni Eropa berupaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dari perubahan penggunaan lahan.

No.	Biofuel	ILUC Value gCO2/MJ	No.	Biofuel	ILUC Value gCO2/MJ
1.	Wheat ethanol	34	6.	Silage maize biogas	21
2.	Maize ethanol	14	7.	Sunflower oil biodiesel	63
3.	Barley ethanol	36	8.	Palm biodiesel	231
4.	Sugar beet ethanol	15	9.	Rape seed oil biodiesel	65
5.	Sugar cane ethanol	17	10.	Soya bean oil biodiesel	150

Tabel di atas merupakan hasil dari perhitungan Delegated Act Uni Eropa, yang menunjukkan bahwa CPO memiliki ILUC value yang tinggi.



⁵ Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, "Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 373034.

Setelah dikeluarkannya Delegated Act pada 2019, dapat dilihat pada grafik jumlah ekspor CPO Indonesia maupun Malaysia pada tahun 2019 mulai mengalami penurunan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Diplomasi Ekonomi

Teori diplomasi ekonomi menjelaskan bagaimana negara menggunakan hubungan ekonomi internasional untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi memanfaatkan instrumen perdagangan, investasi, dan bantuan ekonomi sebagai alat untuk memperkuat hubungan internasional dan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara lain. Joseph Nye (2004) menekankan bahwa kekuatan ekonomi menjadi bagian dari "soft power", di mana negara dapat mempengaruhi keputusan negara lain melalui daya tarik ekonomi dan diplomasi daripada paksaan atau kekuatan militer.⁶

Tingkat Analisa: Organisasi Internasional

Dalam penelitian ini mengambil level analisis organisasi internasional. Mencakup pemahaman mendalam tentang struktur, tujuan, dan strategi CPOPC sebagai organisasi yang mewakili produsen minyak kelapa sawit. Analisis akan mengeksplorasi respon CPOPC terhadap kebijakan RED II Uni Eropa, dengan fokus pada langkah-langkah yang diambil oleh organisasi tersebut untuk melindungi kepentingan industri minyak kelapa sawit dalam menghadapi persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Ini melibatkan evaluasi terhadap dampak kebijakan terhadap industri minyak kelapa sawit, strategi lobi dan diplomasi yang diadopsi oleh CPOPC, serta implikasi jangka panjang dari respon

⁶ Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (Public affairs, 2004).

organisasi terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini akan digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran CPOPC dalam menjaga ekspor komoditas kelapa sawit di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan penelitian kepustakaan. Berdasarkan metode penelitian dalam tulisan ini, teknik pengumpulan data ini diperjelas dengan library research yang pengambilan datanya berdasarkan buku, jurnal, dokumen, naskah dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan CPOPC dalam Menghadapi Kebijakan RED II Uni Eropa

CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa, yang menganggap minyak kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi. Kebijakan ini mengancam pasar ekspor utama bagi Indonesia dan Malaysia, berdampak pada jutaan petani kecil yang bergantung pada industri ini.

CPOPC kesulitan mempengaruhi kebijakan Uni Eropa secara langsung karena keterbatasan kekuatan ekonomi dan politik. Mereka harus bergantung pada diplomasi ekonomi dan soft power untuk memengaruhi opini internasional dan meningkatkan citra kelapa sawit sebagai produk berkelanjutan. Perbedaan persepsi antara produsen dan konsumen tentang keberlanjutan juga menjadi hambatan, meskipun CPOPC telah berupaya

mempromosikan sertifikasi berkelanjutan dan dialog dengan pihak Uni Eropa.

Selain itu, CPOPC mengalami kesulitan membangun kesepakatan multilateral untuk menekan kebijakan RED II. Semua tantangan ini mengancam stabilitas ekonomi negara-negara penghasil kelapa sawit dan menguji kemampuan CPOPC dalam menerapkan strategi diplomasi ekonomi yang efektif. Pembahasan ini akan mengeksplorasi titik-titik lemah dalam strategi diplomasi CPOPC serta tantangan eksternal yang menghambat pencapaian tujuan mereka dalam mempertahankan akses pasar di Eropa.

Tantangan Diplomasi dalam Negosiasi Internasional

1. *Ministerial Meeting* CPOPC dan Tantangan Negosiasi

Ministerial Meeting CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) adalah forum penting bagi para pemimpin negara penghasil minyak sawit untuk membahas isu-isu kritis terkait industri ini, termasuk tantangan perdagangan internasional dan kebijakan lingkungan. Pertemuan ini berfokus pada upaya melawan kampanye anti-minyak sawit dan mendiskusikan kebijakan diskriminatif dari Uni Eropa, seperti usulan Perubahan Penggunaan Lahan Tidak Langsung (ILUC) yang merugikan minyak sawit.

Pada pertemuan 8 November 2018 di Putrajaya, Malaysia,⁷ menteri dari Indonesia dan Malaysia menyatakan keprihatinan mengenai kampanye yang didorong oleh LSM dan legislatif negara pengimpor. Mereka berkomitmen untuk melawan diskriminasi ini dan mengadopsi

⁷ "Council of Palm Oil Producing Countries," accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-5th-ministerial-meeting-of-council-of-palm-oil-producing-countries>.

Agenda SDGs PBB 2030 sebagai pedoman keberlanjutan. Pertemuan ke-6 pada 28 Februari 2019 di Jakarta membahas isu serupa, dengan kesepakatan untuk melawan Delegated Regulation Directive 2018/2001 yang membatasi penggunaan biofuel minyak sawit di UE. Para menteri juga sepakat untuk melakukan misi bersama ke Eropa untuk menangani masalah ini.⁸

Namun, tantangan muncul dari ketidaksepakatan antar negara anggota mengenai strategi dan prioritas dalam menghadapi kebijakan RED II. Perbedaan pandangan tentang sertifikasi keberlanjutan, kebijakan domestik, dan diplomasi internasional dapat melemahkan posisi tawar CPOPC. Keterpecahan ini berpotensi mengurangi efektivitas pertemuan dan kemampuan CPOPC untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat dengan Uni Eropa. Secara keseluruhan, meskipun Ministerial Meeting merupakan platform penting untuk koordinasi, perbedaan pendapat dan tujuan antar anggota menunjukkan kompleksitas dalam membentuk posisi bersama dalam menghadapi tantangan dari kebijakan RED II.

2. Joint Mission CPOPC dan Tantangan Penerimaan Uni Eropa

Joint mission CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) adalah upaya kolaboratif antara negara-negara penghasil minyak sawit, seperti Indonesia dan Malaysia, untuk mengatasi tantangan dalam produksi dan pemasaran minyak kelapa sawit. Misi ini bertujuan menjaga citra positif minyak sawit, menghadapi kebijakan proteksionisme, dan berupaya

⁸ “Council of Palm Oil Producing Countries,” accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-6th-ministerial-meeting-of-council-of-palm-oil-producing-countries>.

meningkatkan kerjasama global. Misi bersama ini berlangsung di Brussels, Belgia, pada 8-9 April 2019, dipimpin oleh Darmin Nasution dari Indonesia dan Dato' Dr. Tan Yew Chong dari Malaysia. Misi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pada Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC ke-6 untuk menentang Delegated Regulation dari Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap minyak sawit.⁹

CPOPC menilai Delegated Act sebagai upaya untuk mengisolasi minyak sawit dari sektor energi terbarukan, mengutamakan minyak nabati lainnya. Mereka mengkritik penilaian Uni Eropa yang mengklasifikasikan minyak sawit sebagai biofuel tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terkait ILUC, sementara minyak kedelai dianggap lebih rendah risikonya meskipun ada bukti deforestasi yang lebih tinggi. Selama misi, delegasi CPOPC berusaha menyampaikan keprihatinan kepada otoritas Uni Eropa, berharap untuk solusi atas tantangan yang mereka hadapi. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil, dan Uni Eropa tetap menerapkan Delegated Act RED II pada 10 Juni 2019 tanpa mengubah elemen yang dinilai diskriminatif oleh CPOPC.

3. Tantangan dalam Implementasi Sertifikasi Keberlanjutan oleh CPOPC

CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) telah mengembangkan Good Farming Practices – Sustainable Palm Oil (GFP-SPO) sebagai pedoman untuk sertifikasi minyak sawit berdasarkan SDGs PBB.¹⁰ Kerangka

⁹ “Council of Palm Oil Producing Countries,” accessed June 2, 2024,

<https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-joint-mission-of-cpopc-8-april-2019-brussels>.

¹⁰ “Council of Palm Oil Producing Countries,” accessed June 2, 2024,

<https://cpopc.net/pressroom/read/the-launching-of-global-framework-principles-of-sustainable-palm-oil>.

kerja ini bertujuan menilai kontribusi minyak sawit terhadap pembangunan berkelanjutan dan mendukung skema sertifikasi yang ada, seperti ISPO di Indonesia dan MSPO di Malaysia. Direktur Eksekutif CPOPC, Tan Sri Dr. Yusof Basiron, menekankan bahwa minyak sawit adalah alternatif berkelanjutan dibandingkan minyak nabati lainnya. Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Musdhalifah Machmud, menyatakan GFP-SPO memberikan standar yang seragam dan bersifat sukarela, bukan sebagai skema sertifikasi baru.

GFP-SPO diharapkan dapat membantu memenuhi permintaan global secara berkelanjutan. Namun, tantangan muncul dalam implementasi, termasuk kebutuhan pelatihan, penyesuaian praktik industri, dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan. Negara-negara anggota mungkin menghadapi kesulitan akibat keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Persepsi Uni Eropa terhadap GFP-SPO juga menjadi faktor penting. Meskipun dirancang untuk memenuhi standar keberlanjutan, Uni Eropa mungkin meragukan efektivitasnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas, yang dapat mempengaruhi kemampuan CPOPC dalam merespons kebijakan RED II.

4. Tantangan dalam Menekan Uni Eropa Melalui Desakan Diplomatik

Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) mendesak Uni Eropa (UE) untuk merevisi pendekatan kebijakan terhadap minyak nabati dalam bahan bakar hayati di bawah Petunjuk Energi Terbarukan II (RED II). Mereka meminta agar risiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC) diperlakukan lebih adil dan semua minyak nabati berkelanjutan dievaluasi

berdasarkan praktik produksi yang terverifikasi, bukan jenis komoditas.¹¹

CPOPC menunjukkan bukti bias UE terhadap minyak sawit, dengan analisis yang menunjukkan bahwa meskipun minyak sawit memiliki peningkatan luas panen tertinggi, jejak minyak nabati lainnya lebih besar. Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen utama, telah menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, seperti penundaan pembukaan lahan baru dan pengurangan angka kebakaran hutan.

Namun, tantangan utama CPOPC adalah sikap tegas UE yang enggan mengubah kebijakan RED II, menganggapnya penting untuk mencapai target lingkungan. CPOPC juga menghadapi kurangnya dukungan dari negara-negara di luar UE, yang memperlemah posisi mereka dalam negosiasi. Tanpa koalisi yang kuat, upaya diplomatik CPOPC dapat kurang efektif dalam menghasilkan hasil yang signifikan.

Peningkatan Kapasitas Petani Kelapa Sawit dan Tantangan Internal

CPOPC berupaya meningkatkan kapasitas petani kelapa sawit dan smallholders untuk menghadapi kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit. Inisiatif ini meliputi pelatihan teknis, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pendampingan untuk meningkatkan praktik budidaya yang berkelanjutan.

Program cross visit memungkinkan petani dari negara anggota CPOPC untuk

¹¹“Council of Palm Oil Producing Countries,” accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/cpopc-calls-on-eu-to-adopt-non-discriminatory-biofuels-policy-to-fight-climate-change>.

bertukar pengetahuan dan pengalaman. Contohnya, kunjungan petani Indonesia ke Malaysia pada Desember 2019 memberikan wawasan tentang praktik pertanian terbaik. Peserta menilai program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan mereka.¹²

CPOPC juga menjalankan Program Jangkauan Smallholder yang mencakup pendidikan, akses pasar, pengembangan infrastruktur, dan pembinaan komunitas. Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani kecil agar lebih produktif dan berkelanjutan dalam industri kelapa sawit. Melalui inisiatif ini, diharapkan petani kecil dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada keberlanjutan industri secara keseluruhan.¹³

CPOPC juga menyelenggarakan Workshop dan Kunjungan Lapangan untuk Petani Kecil yang fokus pada tantangan dalam memperoleh sertifikasi berkelanjutan untuk produksi minyak kelapa sawit. Acara ini bertujuan mengatasi hambatan yang dihadapi petani kecil dan berbagi pelajaran dari kasus-kasus sukses. Workshop ini biasanya mencakup presentasi oleh para ahli dalam pertanian berkelanjutan dan proses sertifikasi, memberikan wawasan mengenai persyaratan dan manfaat sertifikasi. Selain itu, perwakilan dari komunitas petani yang telah sukses mendapatkan sertifikasi akan berbagi pengalaman dan praktik terbaik mereka,

yang bisa menjadi inspirasi bagi peserta lain.¹⁴

Diskusi interaktif menjadi bagian penting dari acara, memungkinkan peserta bertukar ide dan mencari solusi dari sesama petani dan ahli. Kunjungan lapangan ke kebun kelapa sawit berkelanjutan memberikan kesempatan bagi peserta untuk melihat praktik pertanian yang berhasil diterapkan secara langsung. Workshop ini juga menyertakan sesi peningkatan kapasitas, di mana petani kecil dapat belajar tentang praktik pertanian berkelanjutan dan kepatuhan terhadap standar sertifikasi. Semua ini dirancang untuk mendukung petani kecil dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Namun, tantangan internal seperti kurangnya sumber daya dan keterbatasan akses pelatihan tetap menjadi masalah. Petani, terutama di daerah terpencil, sering kali kesulitan mengadopsi teknologi baru dan mengubah praktik tradisional yang telah lama diterapkan. Selain itu, CPOPC juga menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk menerapkan praktik berkelanjutan, termasuk sertifikasi seperti Green Palm dan Sustainable Palm Oil. Meskipun ada inisiatif ini, tantangan besar muncul dari perusahaan besar yang terlibat dalam deforestasi dan kerusakan lingkungan. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk mendorong komitmen perusahaan terhadap praktik berkelanjutan.

KESIMPULAN

CPOPC secara aktif menggunakan diplomasi ekonomi sebagai sarana untuk

¹² "Council of Palm Oil Producing Countries," accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/advancing-the-capacity-of-palm-oil-smallholders-through-cross-visit>.

¹³ "Council of Palm Oil Producing Countries," accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-the-third-of-smallholder-outreach-program-africa-session>.

¹⁴ "Council of Palm Oil Producing Countries," accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/cpopc-smallholders-workshop-and-field-visit-challenges-of-smallholders-achieving-sustainable>.

merespons kebijakan RED II Uni Eropa, melalui upaya seperti negosiasi, joint mission, dan desakan diplomatik. Diplomasi ekonomi digunakan untuk mendorong dialog dan menekankan pentingnya kelapa sawit bagi ekonomi negara-negara produsen, sembari mencoba membangun kerjasama bilateral dan multilateral dengan Uni Eropa.

Meskipun ada upaya signifikan dalam kerangka diplomasi ekonomi, CPOPC belum mampu mencapai hasil yang diinginkan, yaitu penghapusan atau revisi kebijakan RED II. Kendati telah melakukan negosiasi dan kampanye diplomatik, resistensi dari Uni Eropa, terutama terkait standar keberlanjutan lingkungan yang diadopsi dalam RED II, menjadi tantangan utama yang sulit diatasi.

Salah satu kendala utama dalam diplomasi ekonomi CPOPC adalah kurangnya daya tawar terhadap Uni Eropa. Perbedaan pandangan tentang standar keberlanjutan dan hambatan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan memperlihatkan bahwa CPOPC belum memiliki pengaruh yang cukup kuat di tingkat internasional untuk mendorong perubahan kebijakan di Uni Eropa. Selain itu, tantangan internal seperti koordinasi antar negara anggota CPOPC juga memengaruhi efektivitas strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan.

REFERENSI

- Muhammad Hudori, "Perbandingan Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Citra Widya Edukasi* 9, no. 1 (2017): 93–112.
- Rosita Dewi, "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan," *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1, no. 2 (2018): 201–65.
- Yuni Permatasari, "Pemberhentian Impor Kelapa Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Dalam Perspektif Ekonomi Politik (National Interest)," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 1 (2022): 105–45.
- Widyaningtyas, Dian, and Tri Widodo. "Analisis pangsa pasar dan daya saing CPO Indonesia di Uni Eropa." *Jurnal Manajemen Daya Saing* 18.2 (2017): 138-145.
- Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, "Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 373034.
- Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (Public affairs, 2004).
- "Council of Palm Oil Producing Countries," accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-5th-ministerial-meeting-of-council-of-palm-oil-producing-countries>.
- "Council of Palm Oil Producing Countries," accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-6th-ministerial-meeting-of-council-of-palm-oil-producing-countries>.
- "Council of Palm Oil Producing Countries," accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-joint-mission-of-cpopc-8-april-2019-brussels>.
- "Council of Palm Oil Producing Countries," accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/the-launching-of-global-framework-principles-of-sustainable-palm-oil>.

“Council of Palm Oil Producing Countries,” accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/cpopc-calls-on-eu-to-adopt-non-discriminatory-biofuels-policy-to-fight-climate-change>.

“Council of Palm Oil Producing Countries,” accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/advancing-the-capacity-of-palm-oil-smallholders-through-cross-visit>.

“Council of Palm Oil Producing Countries,” accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/pr>

[ess-release-the-third-of-smallholder-outreach-program-africa-session](#).

“Council of Palm Oil Producing Countries,” accessed June 2, 2024, <https://cpopc.net/pressroom/read/cpopc-smallholders-workshop-and-field-visit-challenges-of-smallholders-achieving-sustainable>.